

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azhar, Muhamad. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*.

Badan Pengkajian MPR RI. *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.

Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.

Hardjoprajitno, Purbadi, Saefulloh M. Badrun dan Tiesnawati Wahyuningsih. *Hukum Ketenagakerjaan*. Banten: Universitas Terbuka, 2020.

Malau, Parningotan. *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Sofmedia, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Sadi Is, Muhamad dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Setiadji, Bambang. *Upah Antar Industri Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1985.

Sukmana, Oman dkk. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

Suratman. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Suteki. *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Abdullah, Junaidi “Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9.1, Januari-Juni 2018.

Apendi, Sofyan. “Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”. *Pakuan Law Review Journal* 7.1, Januari-Juni 2021.

Aprianti, Nurul, Muchamad Ali Safa’at dan Indah Dwi Qurbani. “Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9.2, Agustus 2021.

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1, Juni 2020.
- Budijanto, Oki Wahyu. “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.3, September 2017.
- Djazuli, Riza Fauziah. “Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia”. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15.1, Maret 2021.
- Firdaus, Ridho Alvian. “Analisis Hukum Pengupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1.4, Oktober 2023.
- Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat”. *Jurnal Khazanah Hukum*, 2.3, November 2020.
- Hadi, Abdul dan Dadan Herdiana. “Penentuan Upah Minimum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”. *Jurnal Surya Kecana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8.1, Juli 2021.
- Hasanah, Hasyim “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”. *Jurnal at-Taqaddum* 8.1, Juli 2016.

- Hasim, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem". *Jurnal Madani Legal Review*, 1.2, Desember 2017.
- Hasri, Triani Fatika, Sonhaji dan Suhartoyo. "Peran Dewan Pengupahan Kota Semarang Dalam Rangka Perlindungan (Upah) Pekerja/Buruh". *Diponegoro Law Journal* 9.1, Januari 2020.
- Ibrahim, Zulkarnain, "Hakekat Hukum Pengupahan Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pekerja". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44.4, Oktober 2015.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3, September 2020.
- Izzaty dan Rafika Sari. "Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4.2, Desember 2013.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023: Evaluasi Kebijakan Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52.2, Juli 2023.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido* 1.1, Juli 2019.

- Mirza, Muhammad Farrel Radiand R., Slamet Santoso dan Retna Hanani. “Implementasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review* 10.3, Juli 2021.
- Murniyati. “Analisi Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”. *Jurnal Widya Cipta*, 6.2, September 2014.
- Nelson, Alden dkk. “Peran Organisasi Pengusaha Dalam Hubungan Industrial Pada Industri Manufaktur”. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10.4, 2023.
- Pambudi, Garda Yustisia dan Fatma Ulfatun Najicha. “Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Gema Keadilan* 9.1, Agustus 2022.
- Paramita, Rastri. “Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. *Jurnal Budget* 6.2, 2021.
- Prajnaparamita, Kanyaka. “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”. *Administrative Law & Governance Journal* 1.1, Agustus 2018.
- Suhartoyo. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”. *Administrative Law & Governance Journal* 2.2, Juni 2019.
- Suhartoyo. “Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”. *Administrative Law & Governance Journal* 3.3, September 2020.

Sumardi, Fauzi dan Ridho Mubarak. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5.1, Juni 2018.

Suryoningprang, M. Bambang Suradi dan Sonhaji. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Upah Minimum di Jawa Tengah Melalui Suatu Analisis Komparasi (Studi Kasus Kota Semarang dan Kabupaten Demak)”. *Diponegoro Law Journal* 5.3, Juni 2016.

Tjandra, Surya Yasmine, MS Soraya dan Jamaludin. *Advokasi Pengupahan di Daerah (Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi Daerah)*. Jakarta: Trade Union Right Centre, 2007.

Trimaya, Arrista. “Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”. *Jurnal Aspirasi* 5.1, Juni 2014.

Ubaiyana dan Mar’atun Fitriah. “Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011”. *Jurnal Mimbar Hukum* 33.2, Desember 2021.

Wiryawan, I Wayan Gede. “Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan di Indonesia”. *Jurnal Advokasi* 6.1, 2016.

Zuklarnaen, Ahmad Hunaeni. “Hukum Pengupahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Keinginan Semua Pihak dalam Hubungan Industrial”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6.2, Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Permenaker Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan.

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021 – 2024 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/430 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset/Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918205
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh@live.undip.ac.id

Nomor : 493/UN7.F1/AK/X/2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

17 OCT 2023

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro No.21, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Rizki Ahmad
NIM : 11000120130313
Alamat : Jl. Ngesrep Timur V, Gang Rukun Masjid No. 18, RT 01/RW 03,
Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang
Nomor HP : 081227614810
Bidang minat : Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Implementasi Perhitungan Upah Minimum Kota Semarang Tahun
2023 Dalam Kondisi Dualisme Peraturan Pengupahan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Lampiran 2. Surat Jawaban Instansi Tempat Melaksanakan Riset/Penelitian

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
DINAS TENAGA KERJA
Jalan Ki Mangusarkoro No 21 Telepon (024) 8440335, 8440339 SEMARANG

Nomor : B/108/PK.03.05/X/2023 Semarang, 18 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Penelitian an
Rizki Ahmad

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
di -
SEMARANG

Sehubungan dengan Surat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Nomor: 493/UN7.F1/AK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Ijin Riset/
Penelitian yang diajukan kepada kami oleh Mahasiswa atas nama:

Nama : Rizki Ahmad
NIM : 11000120130313
Program Studi : S1 Hukum Administrasi Negara

Dengan ini kami memberi izin kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk
melakukan penelitian dan pengambilan data untuk penyusunan skripsi dengan
judul **Implementasi Perhitungan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2023**
dalam Kondisi Dualisme Peraturan Pengupahan di Dinas Tenaga Kerja Kota
Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Semarang
Sekretaris,

Slamet Budiutomo, S.Ag, S.H., M.Hum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

